

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir setiap jenis perusahaan dibentuk dengan tujuan dan fungsi yang berbeda, namun setiap perusahaan memiliki tujuan umum yang sama yaitu menghasilkan laba secara maksimal. Hal yang tidak dapat dipungkiri terdapat perusahaan yang tidak memfokuskan untuk mencari laba melainkan memberikan pelayanan untuk masyarakat. Namun perusahaan tetap memperhitungkan pendapatan yang diperoleh untuk menjamin lancarnya kegiatan perusahaan dalam memberikan pelayanan dan mensejahterakan karyawan perusahaan tersebut. Untuk memperoleh pendapatan atau laba yang maksimal maka peran manajer adalah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi proses kegiatan perusahaanya.

Laba yang maksimal dapat diperoleh dengan memperhatikan variabel biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, karena laba adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Menurut (Muammar, Jubi, Isnawati, & Kamilah, 2018) biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang untuk memperoleh barang maupun jasa yang diharapkan mampu memberikan manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) biaya adalah jumlah yang dapat diukur dengan satuan uang, berupa pengeluaran dalam bentuk pemindahan kekayaan, pengeluaran modal saham, jasa yang diserahkan maupun kewajiban yang ditimbulkan yang berhubungan dengan

barang atau jasa yang diperoleh atau yang akan diperoleh. Hal tersebut adalah alasan mengapa untuk mendapatkan pendapatan dan laba yang maksimal pengendalian biaya merupakan salah satu variabel yang harus diperhatikan untuk meminimalisir pengeluaran biaya yang tidak efisien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 mengenai klasifikasi dan perizinan, salah satu institusi milik pemerintah yang memiliki fungsi utama sebagai pemberi layanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat untuk masyarakat adalah Rumah Sakit. Salah satu bentuk dari upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka dibangunlah rumah sakit baik, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun yang dibangun oleh pihak swasta.

Pengelolaan rumah sakit yang efektif dan efisien adalah syarat mutlak agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang optimal. Untuk menjalankan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan maka perlu dilakukan penataan secara administratif dan pengelolaan keuangan agar aliran dana yang disalurkan kepada instansi rumah sakit dapat dipergunakan dengan bijak. Oleh sebab itu, pemerintah telah memberikan keringanan berupa fleksibilitas bagi instansi tertentu yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Unit Daerah, fleksibilitas yang dimaksud yaitu dalam pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan anggaran, baik dalam kegiatan belanja, dalam pengelolaan kas rumah sakit, pengelolaan piutang rumah sakit, investasi, pengadaan barang dan jasa, pendapatan surplus dan remunerasi. Ditetapkannya status BLUD

pada Rumah Sakit bertujuan meningkatkan profesionalisme dan mendorong transparansi, dan tingkat akuntabilitas pelayanan publik.

Berdasarkan keputusan Bupati Buleleng No. 445/405/HK/2009 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sesuai dengan aturan tersebut, satuan kerja yang berstatus sebagai BLUD diberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangannya. Untuk mencegah timbulnya akses negatif penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara dan tercapainya tujuan BLU/BLUD, sebaiknya perlu dilakukannya pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan mengurangi biaya-biaya yang tidak efektif dalam kegiatannya, oleh karena itu BLU/BLUD perlu menerapkan metode yang berguna untuk menunjang pengendalian biaya.

Dengan perubahan sistem keuangan rumah sakit serta sistem keuangan pemerintah, secara keseluruhan diharapkan dana yang dikelola oleh rumah sakit akan menjadi lebih besar dan terus meningkat sejalan dengan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta persiapan badan layanan umum dari tahun ke tahun. Kondisi ini selain akan membawa pengaruh positif bagi peningkatan pelayanan, tetapi juga membuka peluang untuk timbulnya akses negatif penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu diperlukan berbagai upaya dalam mengatasinya.

Pengendalian biaya adalah tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan aktivitas perusahaan agar tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajer harus mampu meminimalisir biaya yang dikeluarkan terutama biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk

atau jasa. (Fadhilah, 2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa alternatif dalam pengendalian biaya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan perusahaan. Alternatif tersebut diantaranya adalah pengendalian melalui anggaran, pengendalian dengan target pendapatan setiap triwulan, dan pengendalian dengan menganalisis varian yang terjadi antara realisasi dan anggaran.

Di dalam perusahaan atau organisasi terdapat banyak aktivitas, yang diselenggarakan oleh petugas berbagai jenis profesi, baik profesi medik, paramedik maupun non-medik. Selain itu juga terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit berupa biaya gaji, biaya perawatan gedung, biaya administrasi dan umum, biaya perawatan alat medis dan biaya lain-lain. Untuk dapat mempertanggung jawabkan biaya yang dikeluarkan, maka diperlukan sistem akuntansi pertanggung jawaban salah satu alat pengendalian yang dipergunakan oleh manajemen dalam mengendalikan biaya dan pendapatan adalah sistem akuntansi pertanggungjawaban (Benu, Gasim, & Maryono, 2018).

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk merencanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab para manajernya. Pendapatan, beban, laba, investasi dikumpulkan dan dilaporkan untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit dalam organisasi yang bertanggungjawab atas tugas-tugas tertentu sesuai dengan wewenang yang diterimanya. Setiap pusat pertanggungjawaban hanya dibebani

pendapatan, beban, laba, atau investasi yang dapat dikendalikannya (Supriyono, 2018).

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng merupakan rumah sakit milik pemerintah type B non pendidikan, berdasarkan SK MenKes RI No 476 tanggal 20 Mei 1997) dan pada tahun 2017 RSUD Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/I0566/2017 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Udayana). Hingga tahun 2020 RSUD Kabupaten Buleleng memiliki tenaga kerja medis, paramedis dan non medis sejumlah 1.276 orang, dengan pegawai berstatus ASN sebanyak 517 dan pegawai kontrak sebanyak 759 orang.

Dalam kegiatan operasionalnya RSUD Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan pendapatan pada tahun 2017 namun secara berturut – turut selalu mengalami penurunan pendapatan hingga tahun 2020.

Tabel 1.1 :
Realisasi Pendapatan RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pendapatan
2016	Rp 117.821.377.860,67
2017	Rp 153.897.791.189,55
2018	Rp 126.702.512.050,25
2019	Rp 118.509.689.475,88
2020	Rp 117.726.630.274,42

Sumber : Bagian Keuangan RSUD Kabupaten Buleleng

Pendapatan RSUD Kab. Buleleng mengalami penurunan sebesar 17,68% pada tahun 2018 dan terus mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 6,47% dan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar

0,66%. RSUD Kabupaten Buleleng mengalami defisit pendapatan sebesar Rp 60 miliar. Selain mengalami penurunan pendapatan RSUD Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 juga mengalami defisi anggaran yang disebabkan oleh jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah belanja atau biaya yang dikeluarkan (Nusabali.com, 2020).

Tabel 1.2 :

Pendapatan – Beban dari Kegiatan Operasional Tahun 2018

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan	
Pendapatan LO	145.439.564.172,91
Jumlah	145.439.564.172,91
Klasifikasi Beban Operasional	
Beban Pegawai	37.444.745.682,00
Beban Barang/Jasa	130.296.653.907,95
Beban Penyusutan dan Amortisasi	16.133.772.685,54
Beban Penyisihan Piutang	625.406.870,08
Jumlah	184.500.579.145,57

Sumber : Bagian Keuangan RSUD Kab. Buleleng

Dari kegiatan operasional, dihasilkan defisit kegiatan operasional sebesar Rp 39.061.014.972,66.

Tabel 1.3 :

Pendapatan – Beban dari Kegiatan Operasional Tahun 2019

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan	
Pendapatan – LO	148.300.820.446,54
Jumlah	148.300.820.446,54
Klasifikasi Beban Operasional	
Beban Pegawai	38.871.983.895,00
Beban Barang/Jasa	117.235.183.495,45
Beban Penyusutan dan Amortisasi	16.285.773.367,43
Beban Penyisihan Piutang	664.676.153,07
Jumlah	173.057.616.910,95

Sumber : Bagian Keuangan RSUD Kab. Buleleng

Dari kegiatan operasional, dihasilkan defisit kegiatan operasional sebesar Rp 24.756.796.464,41

Tabel 1.4 :
Pendapatan – Beban dari Kegiatan Operasional Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan	
Pendapatan LO	155.124.472.795,82
Jumlah	155.124.472.795,82
Klasifikasi Beban Operasional	
Beban Pegawai	33.851.249.188,00
Beban Barang/Jasa	104.774.432.290,17
Beban Penyusutan dan Amortisasi	16.015.716.569,08
Beban Penyisihan Piutang	1.607.379.777,66
Jumlah	156.248.777.824,91

Sumber : Bagian Keuangan RSUD Kab. Buleleng

Dari kegiatan operasional, dihasilkan defisit kegiatan operasional sebesar Rp 1.124.305.029,09

Permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Kab. Buleleng disebabkan besarnya beban yang dikeluarkan dan pendapatan terus menurun berdasarkan data dari kegiatan operasional sudah terjadi defisit terus menerus dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Penurunan pendapatan secara terus menerus akan menyebabkan kegiatan rumah sakit berjalan tidak efektif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, maka organisasi perlu menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan baik yang merupakan sistem untuk mengendalikan tanggungjawab di setiap unit kerja. Adanya pusat pertanggungjawaban di setiap unit kerja diharapkan manajer dapat menilai tanggungjawab dan mengukur prestasi para anggotanya secara objektif atas tugas yang didelegasikan kepada karyawannya. Didukung oleh teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan.

Begitupun dengan keberadaan akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan. Pihak manajemen puncak sebagai pemberi wewenang dan manajer di setiap divisi atau sebagai bagian penerima wewenang. Pada dasarnya pendelegasian wewenang ini dikarenakan pimpinan tidak mampu untuk mengkoordinir seluruh kegiatan perusahaan akibat tingkat kompleksitas operasional perusahaan yang semakin meningkat. Hal tersebut akan mempermudah manajemen mengambil keputusan atas pengendalian biaya yang ada, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Didasarkan dari uraian di atas, penerapan akuntansi pertanggungjawaban dirasakan penting dikarenakan mampu membantu manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian biaya. Penelitian mengenai hubungan antara akuntansi pertanggungjawaban dengan pengendalian biaya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain : Penelitian yang dilakukan oleh (Wandari & Sujana, 2021) dengan judul Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada RSUD Kab. Buleleng menggunakan metode penelitian deskriptif memperoleh hasil penelitian variabel pelaporan pertanggungjawaban berbeda dengan teori.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiyanto & Norafyana, 2017) dengan judul Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Pengendalian Biaya Pada Industri Manufaktur Di Batam menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan struktur organisasi, anggaran, pengendalian di dalam akuntansi pertanggungjawaban secara simultan berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya, sedangkan variabel

pelaporan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap pengendalian biaya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pormes, 2016) dengan judul Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya Studi Empiris Pada Hotel Di Kota Ambon menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan struktur organisasi pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan anggaran akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Penelitian (Nisak, 2016) dengan judul Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT. Telkom Cabang Lamongan memperlihatkan variabel pelaporan berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya sedangkan perencanaan/anggaran tidak berpengaruh terhadap pengendalian biaya.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng terus berupaya agar memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya sehingga mempermudah usaha Rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanannya yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan ada dua hal yang membuat peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian. Pertama, adanya ketidak konsistenan hasil penelitian antara satu peneliti dengan penelitian lainnya mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Kedua, peneliti menemukan adanya fenomena penurunan pendapatan yang terjadi terus menerus dari tahun 2018-2020 dan terjadi defisit anggaran operasional pada BLUD RSUD Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wandari & Sujana, 2021) menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan anggaran dan relisasinya kemudian dianalisis penyebab terjadinya varians antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sedangkan dalam penelitian ini , metode yang digunakan adalah *Mix Method* dengan menggunakan kuisioner dan didukung data hasil wawancara, dan hasil kuisioner tersebut akan diolah lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana hubungan penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BLUD RSUD Kab. Buleleng dengan menjadikan akuntansi pertanggungjawaban kedalam empat sub variabel yaitu : Struktur Organisasi (X1), Perencanaan/Anggaran (X2), Pengendalian/Pelaksanaan (X3) dan Pelaporan (X4).

Berdasarkan penjelasan di atas dan melihat pentingnya akuntansi pertanggungjawaban untuk manajer melakukan pengendalian biaya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Pengendalian Biaya Pada BLUD RSUD Kab. Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pengendalian biaya belum dilaksanakan secara efektif sehingga pengeluaran biaya menjadi lebih besar dari pendapatan.
2. Kurang efektifnya perusahaan dalam mencapai pendapatan yang maksimal untuk menutupi pengeluaran biaya.
3. Sistem pelaporan biaya hanya diposting melalui aplikasi SABLUD dan tidak mengidentifikasi jenis biaya dan identifikasi penyimpanan biaya.

1.3 Batasan Masalah

Syarat agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti perlu melakukan pembatasan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian Akuntansi Pertanggungjawaban difokuskan kepada empat variabel yaitu : Struktur Organisasi (X1), Perencanaan/Anggaran (X2), Pengendalian/Pelaksanaan (X3) dan Sistem Pelaporan Biaya (X4). Dan pengendalian biaya sebagai variabel (Y). peneliti membatasi permasalahan dengan memfokuskan pada pengendalian biaya untuk tahun anggaran 2018 – 2020 dan memilih BLUD RSUD Kab. Buleleng sebagai tempat penelitian sesuai dengan fenomena yang peneliti temui dan ingin meneliti apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya?
2. Apakah sistem perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya?
3. Apakah sistem pelaksanaan atau pengendalian dalam akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya?
4. Apakah sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya?
5. Apakah struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian dan pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban secara simultan berpengaruh terhadap pengendalian biaya?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya.
5. Untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian dan pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban secara simultan terhadap pengendalian biaya.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pendukung dari teori-teori mengenai peran akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya, dan untuk melihat seberapa besar pengaruh setiap variabel akuntansi pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan teori yang ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki khususnya pada bidang ilmu akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengendalian biaya suatu organisasi.

b. Bagi Perusahaan atau Praktisi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan terkait masalah peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam menunjang efisiensi pengendalian biaya.

Penelitian ini juga diharapkan agar para stakeholder bisa mendapatkan referensi untuk mempertimbangkan perbaikan atau sumbangan pemikiran kepada manajemen mengenai sistem akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan dalam perusahaan, agar perusahaan dapat mengendalikan biaya secara efisien dan dapat meningkatkan laba perusahaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai masukan dan referensi daftar pustaka untuk penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya.